



PERJANJIAN KERJA SAMA **ANTARA** KANTOR BAHASA PROV. NTB DENGAN FKIP UNW MATARAM TENTANG PENGEMBANGAN LITERASI

NOMOR: 1356/1-418/45/2020 NOMOR: 601/e/UNW.87/XI/2020

Pada hari iniSenin, tanggaltiga puluh bulanNovember, tahun dua ribu dua puluh (30-11-2020)bertempat di Universitas Nahdlatul Wathan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Umi Kalsum, M.Hum.

KepalaKantor Bahasa Provinsi NTB, berkedudukan di JalanDokter Sujuno, Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota

Mataram Nusa Tenggara Barat,

2. Lale Yaqutunnafis, S.Sos., MM.

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Nahdlatul Wathan Mataram berkedudukan di

Jalan Kaktus 1-3 Mataram Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan kerjasama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaatdengan ketentuan sebagai berikut

DASAR HUKUM

Perjanjian kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dilaksanakan atas dasar keinginan bersinergi dan saling mendukung dalam pengembangan literasi Mahasiswa

RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup kesepakatan ini meliputikegiatan pengembangan literasi terutama literasi

BENTUK KERJASAMA Pasal 3

Kerjasama antara kedua belah pihak meliputi kegiata sebagai berikut:

- (2) Penyuluhan Bahasa Indonesia,
- (3) Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah,
- (4) Sastrawan masuk kampus
- (5) Pelatihan penulisan, cerpen, puisi,
- (6) Duta Bahasa, dan
- (7) Pelatihan musikalisasi puisi.

PELAKSANAAN Pasal 4

- (1) Kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak kesepakatan ditandatangani dan diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Dalam hal diperlukan, untuk kelancaran pelaksanaan teknis dari kerja sama ini PARA PIHAK setuju akan membuat tim pelaksana yang terdiri atas perwakilan

PEMBIAYAAN Pasal 5

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini akan diatur berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**

PENYELESAIAN SANGKETA Pasal 6

Setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini**PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 asli bermaterei cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 eksemplar.

FKIP UNWMataram,

Lale Yaqutunnafis, S.Sos., MM.

Kantor Bahasa Prov.NTB,

Umi Kalsum, M.Hum.